



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : ALFIAN, S.Sos  
**NIP** : NIP. 19671108 198903 1 009  
**PANGKAT** : PEMBINA TINGKAT I  
**GOLONGAN** : IV/b  
**JABATAN** : SEKRETARIS

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

#### **B. FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administasi umum. kepegawaian. dan keuangan	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
		Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.736.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.151.810.008	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.532.719	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.910.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.958.406	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
<b>Total</b>		<b>5.545.947.133</b>	

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Sekretaris  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	50 %	50 %	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50 %	47 %	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	60 %	85 %	
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	50 %	50 %	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %	50 %	42 %	

**Tabel Cost Per Outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13.736.000	720.000	5,24%	100 %	50 %	50 %	- 0,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.151.810.008	1.963.330.864	47,29 %	100 %	50 %	47 %	- 0,29%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	174.532.719	103.462.100	59,28 %	100 %	60 %	85 %	26 %
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	623.910.000	292.388.294	46,86 %	100 %	50 %	50 %	4%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	581.958.406	207.307.394	35,62 %	100 %	50 %	42 %	7%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam bidang sekretariat terdiri dari lima kegiatan dimana kegiatan tersebut diampuh oleh sub bidang kepegawaian dan sub bidang keuangan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah evaluasi dan capaian kinerja sekretaris dari masing masing kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 13.736.000
- Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 720.000
- Capaian serapan anggaran adalah: 5,24%
- Capaian kinerja sebesar 50%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Falisitas Administrasi Umum PD. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 4.151.810.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 1.963.330.864
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 47,29 %
- d. Capaian kinerja sebesar 47%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Falisitas Administrasi Umum PD. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 174.532.719
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 103.462.100
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 59,28%
- d. Capaian kinerja sebesar 85%

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 623.910.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 292.388.294
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 46,86%
- d. Capaian kinerja sebesar 50%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon RKA sebesar Rp. 581.958.406
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 207.307.394
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 35,62 %
- d. Capaian kinerja sebesar 42%

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris adapun rencana tindak lanjut kami jelaskan pada table di bawah ini mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja yang belum di raih pada tribulan selanjutnya sesuai time scedhul yang telah ditetapkan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah realisasi anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Interim Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

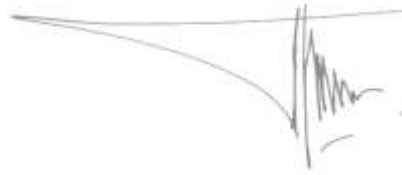
Lumajang, 30 Juni 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG**



**SUNARDI,MP**  
NIP. 196512011989031012

**SEKRETARIS**



**ALFIAN,S.SOs**  
NIP. 196711081989031009



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA : FATIMAH, S.Pd**  
**NIP : NIP. 19780628 199802 2 001**  
**PANGKAT : PENATA**  
**GOLONGAN : III/c**  
**JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.140.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.596.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.520.469	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.479.040	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.367.210	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.166.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penyedia Jasa surat Menyurat	240.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	116.850.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.820.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	557.858.406	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.100.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>1.394.137.125</b>	

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Keterangan	
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7	10	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	2	Dokumen	66	%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	2	Laporan	40	%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	0	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	4	Paket	100	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	6	Laporan	50	%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	1	Paket	50	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	6	Laporan	50	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	6	Laporan	50	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	6	Laporan	50	%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unut	20	Unit	50	%	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	2	Unit	40	%			

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.140.000	0	0%	3 dokumen	2 dokumen	66%	665
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.596.000	720.000	45,10%	5 laporan	2 laporan	40%	-5,1%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.520.469	10.324.500	98,14%	1 paket	1 paket	100%	1,86
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.479.040	81.026.700	99,44%	4 paket	4 paket	100%	0,56%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.367.210	5.466.500	52,73%	2 paket	2 paket	100%	47,27%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.166.000	6.644.400	9,21%	12 laporan	6 Laporan	50%	40,79%

No	Sasaran Program/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
		Jumlah laporan Penyedia Jasa surat menyurat	240.000	52.000	21,67 %	12 laporan	6 Laporan	50 %	28,33 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	116.850.000	41.518.974	35,53 %	12 laporan	6 Laporan	50 %	14,47 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	506.820.000	250.817.320	49,49 %	12 laporan	6 Laporan	50 %	0,51 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	557.858.406	196.407.394	35,21 %	40 Unit	20 unit	50 %	14,79 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.100.000	10.900.000	45,23 %	5 unit	3 unit	60	14,77 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi capaian anggaran dan kinerja

Terdapat 11 Sub kegiatan yang di ampuh oleh ka.umpeg umum dan kepegawaian adapaun evaluasi anggaran dan capaian kinerja sebagai berikut:

##### a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 12.140.000
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 0
- Persentase serapan anggaran adalah 0%
- Presentase capaian kinerja sebesar 66%

##### b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.596.000
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 720.000
- Persentase serapan anggaran adalah 45,10%
- Presentase capaian kinerja sebesar 40%

##### c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 10.520.469
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.324.500
- Persentase serapan anggaran adalah 98,14%
- Presentase capaian kinerja sebesar 100

##### d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 81.479.040
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 81.026.700

- Persentase serapan anggaran adalah 99,44%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 100%
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 10.367.210
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.466.500.
  - Persentase serapan anggaran adalah 52,73%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 72.166.000
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.644.400
  - Persentase serapan anggaran adalah 9,21%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- g. Penyedia Jasa surat Menyurat
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 240.000
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 52.000
  - Persentase serapan anggaran adalah 21,67 %
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 116.850.00
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 41.518.974
  - Persentase serapan anggaran adalah 35,53%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- i. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 506.820.000
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 250.817.320
  - Persentase serapan anggaran adalah 49,49%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 557.858.406
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 196.407.394
  - Persentase serapan anggaran adalah 35,21%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 50%
- k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 24.100.000
  - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.900.000
  - Persentase serapan anggaran adalah 45,23%
  - Presentase capaian kinerja sebesar 60%

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adapun tindak lanjut adalah mempertahankan capaian kinerja yang diraih dengan baik dan melanjutkan sisa capaian kinerja pada tribulan selanjutnya sesuai time scedhul yang di tetapkan jika capaian kinerja tersebut diukur dengan anggaran. Dan melaksanakan capaian kinerja tepat waktu jika capaian kinerja tersebut bisa dilaksanakan tanpa anggaran

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

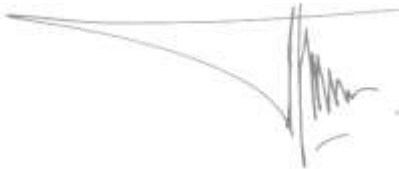
### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

SEKRETARIS



**ALFIAN, S.Sos**  
NIP. 196408171992031014

KA. SUB. BAG. UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



**FATIMAH, S.Pd**  
NIP. 197806281998022001



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : SITI AMINAH, SE  
**NIP** : 19731215 200604 1 016  
**PANGKAT** : PENATA MUDA  
**GOLONGAN** : III/a  
**JABATAN** : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan publikasi;
- b. Menyusun konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal;
- c. Membuat desain tampilan dan ilustrasi dokumen publikasi;
- d. Mengelola dokumen publikasi dan informasi;  
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Bahan Informasi dan publikasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi	240
		Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal	240
		Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan	50
		Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola	240
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban	240

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7		10
1	Tersusunnya Bahan Informasi dan publikasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi	240	dokumen	120	dokumen	50	%	
		Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal	240	dokumen	120	dokumen	50	%	
		Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan	50	dokumen	26	dokumen	50	%	
		Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola	240	dokumen	120	dokumen	50	%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban	240	dokumen	120	dokumen	50	%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 120 dokumen dengan capaian kinerja 50%
2. Target indikator Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 120 dokumen dengan capaian kinerja 50%
3. Target indikator Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan 50 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 25 dokumen dengan capaian kinerja 50%
4. Target indikator Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dengan capaian kinerja sebanyak 120 dokumen, realisasi capaian kinerja 50%
5. Target indikator Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dengan capaian kinerja sebanyak 120 dokumen, realisasi capaian kinerja 50%

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada publik ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**FATIMAH, S.Pd**  
NIP. 197806281998022001

PENYUSUN BAHAN  
INFORMASI DAN PUBLIKASI



**SITI AMINAH, SE**  
NIP. 19731215 200604 1 016



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA : ADI IS HARIYANTO**  
**NIP : NIP. 19800604 200901 1 003**  
**PANGKAT : PENGATUR TINGKAT I**  
**GOLONGAN : II/d**  
**JABATAN : PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Pengadministrasian Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Melakukan kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana
3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
4. Melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana
5. Menyusun laporan sarana dan prasarana secara berkala

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana	Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun	60 dokumen
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	60 kegiatan
		Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana	3 dokumen
		Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun	3 dokumen

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasian Sarana dan Prasana  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana	Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	
		Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun	60	Dokumen	30	dokumen	50	%	
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	60	Kegiatan	30	kegiatan	50	%	
		Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana	3	Dokumen	2	dokumen	66,66	%	
		Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun	3	Dokumen	2	dokumen	66,66	%	

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun target sebesar 1 dokumen dengan relisasi dokumen capaian kinerja sebesar 100%

2. Target indikator Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun target sebesar 60 dokumen dengan relisasi 30 dokumen capaian kinerja sebesar 50%
3. Target indikator Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor target sebesar 60 kegiatan dengan relisasi 30 kegiatan capaian kinerja sebesar 50%
4. Target indikator Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana target sebesar 3 dokumen dengan relisasi 2 dokumen capaian kinerja sebesar 67%
5. Target indikator Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun target sebesar 2 dokumen dengan relisasi 2 dokumen capaian kinerja sebesar 66,66%

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

**BAB III**  
**PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dan kepada Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**FATIMAH, S.Pd**  
NIP. 197806281998022001

PENGADMINISTRASI  
SARANA DAN PRASARANA



**ADI IS HARIYANTO**  
NIP. 19800604 200901 1 003





**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **EVI RATNA DEWI**  
**NIP** : **198009032009092001**  
**PANGKAT** : **PENGATUR TINGKAT I**  
**GOLONGAN** : **II/c**  
**JABATAN** : **PENGADMINISTRASI UMUM**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Pengadministrasi Umum yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi umum;
2. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi umum;
3. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen administrasi umum;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (5)
1	Meningkatnya kegiatan Administrasi Umum	Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima	45 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat	45 dokumen
		Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum	45 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasian Umum  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	Meningkatnya kegiatan Administrasi Umum	Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima	45	Dokumen	22	dokumen	48,88	%	
		Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat	45	Dokumen	22	dokumen	48,88	%	
		Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum	45	Kegiatan	22	kegiatan	48,88	%	

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar

- 45 dokumen dengan realisasi pada triwulan II sebanyak 22 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 48,88%
2. Target indikator Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat sebanyak 45 dokumen dengan realisasi pada triwulan II sebanyak 22 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 48,88%
  3. Target indikator Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum sebanyak 45 dokumen dengan realisasi pada triwulan II sebanyak 22 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 48,88%

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Pengadministrasi Umum adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Laporan kurang baik                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah Baik                  |
| <input type="checkbox"/>            | Laporan Diperbaiki                  |
| <input type="checkbox"/>            | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/>            | Capaian diteliti ulang              |
| <input type="checkbox"/>            | Lain-lain                           |

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasi Umum dan kepada Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Pengadministrasi Umum Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PENGADMINISTRASI UMUM



**FATIMAH, S.Pd**  
NIP. 197806281998022001

**EVI RATNA DEWI**  
NIP.198009032009092001



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : TATIK SUHARTINI, SE  
**NIP** : 19750305 201406 2 001  
**PANGKAT** : PENATA  
**GOLONGAN** : III/c  
**JABATAN** : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Kepala Sub. Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gaturugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Keuangan dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

<b>No.</b> <b>(1)</b>	<b>Sasaran Kinerja</b> <b>(2)</b>	<b>Indikator Kinerja</b> <b>(3)</b>	<b>Target</b> <b>(4)</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan ASN	38 Orang/12 Bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b> Rp	<b>Keterangan</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.081.650.008	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.072.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.704.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.784.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>4.151.810.008</b>	



## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	orang/bulan	35/6	orang/bulan	50	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	6	dokumen	50	%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	laporan	6	laporan	50	%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	jenis dokumen	3	jenis dokumen	60	%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	9	jenis dokumen	50	%	

Tabel Cost Per Outcome

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja					Efisiensi 9-6	
			Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Target	Realisasi	Capaian 9=8/7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji Tunjangan ASN	4.081.650.008	1.937.210.864	47,46 %	36/12 bln	Org/bln	35/6bln	50	%	6,35	%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.776.000	26.120.000	39,71 %	12	Dokumen	6	50	%	7,78	%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	4.704.000	990.000	21,05 %	12	Dokumen	6	50	%	3,95	%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	0	0 %	5	Laporan	3	60	%	60	%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1.784.000	0	0 %	18	Laporan	9	50	%	50	%

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Adapun evaluasi Ka Sub Bag keuangan antara lain :

- a. sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Rp 4.081.650.008 realisasi anggaran Triwulan II Rp 1.937.210.864 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 47,46 %, Sedangkan target kinerja sebesar 36org/6 bln dengan realisasi capaian kinerja tribulan II sebesar 35 org/6 bln sama dengan 50%
- b. sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran Rp. 65.776.000 dengan realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp. 26.120.000 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 39,71 %, Sedangkan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi sebesar 6 dokumen capaian kinerja triwulan II sebesar 50%
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 4.704.000 dengan realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp. 990.000,- dengan prosentase serapan anggaran sebesar 21,05 %, Sedangkan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi sebesar 6 dokumen, capaian kinerja triwulan II sebesar 50%
- d. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu anggaran Rp 2.600.000 realisasi anggaran Tribulan II Rp 0, dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %, Sedangkan target kinerja sebesar 5 laporan dengan realisasi sebesar 3 laporan, capaian kinerja tribulan II sebesar 60%
- e. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pagu anggaran Rp 1.784.000 realisasi anggaran Triwulan II Rp 0 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %. Sedangkan target kinerja sebesar 18 laporan dengan realisasi sebesar 9 laporan capaian kinerja tribulan II sebesar 50 %

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Keuangan guna mencapai target kinerja adapun tindak lanjut yang harus dilkakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

**BAB III  
PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Keuangan dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023  
KA.SUBAG. KEUANGAN

SEKRETARIS



**ALFIAN, S.sos**  
NIP. 196711081989031009



**TATIK SUHARTINI, SE**  
NIP. 19750305 2014062001



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA : SULISTIYONO**  
**NIP : 19750819 200901 1 002**  
**PANGKAT : PENGATUR TINGKAT I**  
**GOLONGAN : II/d**  
**JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Keuangan (Subag Keuangan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

1. Mempersiapkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
2. Mengumpulkan dan menyusun bukti – bukti pengeluaran / penggunaan uang
3. Mencatat semua dokumen keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Mendokumentasi-kan semua dokumen keuangan;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Keuangan dengan Subag Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan dan peralatan yang di perlukan untuk melaksanakan tugas	60 Dokumen
		Jumlah dokumen yang dikumpulkan dan bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang yang di susun	375 dokumen
		Jumlah dokumen Keuangan yang di susun	375 dokumen
		Jumlah Dokumen keuangan yang di dokumentasikan	375 Dokumen

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Ket		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas	60	dokumen	30	dokumen	50	%	
		Jumlah dokumen yang dikumpulkan dan bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang yang disusun	375	dokumen	188	dokumen	50	%	
		Jumlah dokumen keuangan yang disusun	375	dokumen	188	dokumen	50	%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Ket
			Target		Realisasi		Capaian		
		Jumlah dokumen keuangan yang didokumentasikan	375	dokumen	188	dokumen	50	%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diterima dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar 60 Dokumen dengan realisasi 30 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50%
2. Target indikator Jumlah dokumen yang dikumpulkan dan bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang yang disusun dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar 375 Dokumen dengan realisasi 188 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50%
3. Target indikator Jumlah dokumen keuangan yang didokumentasikan dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar 375 dokumen dengan realisasi 188 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50%
4. Target indikator Jumlah dokumen keuangan yang disusun dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar 375 dokumen dengan realisasi 188 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50%

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut tindak lanjut kami sajikan pada table di bawah ini :

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Pengadministrasi Keuangan (Subag Keuangan) adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**


LKj Interim disusun sebagai bentuk Pengadministrasi Keuangan dan Subag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Pengadministrasi Keuangan (Subag Keuangan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

SUBAG KEUANGAN

PENGADMINISTRASI KEUANGAN



**TATIK SUHARTINI, SE**  
NIP. 19750305 201406 2 001



**SULISTIYONO**  
NIP. 19750819 200901 1 002





**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : DIDIK BUDI SANTOSO, SH,MM  
**NIP** : 19661111 198903 1 013  
**PANGKAT** : PEMBINA  
**GOLONGAN** : IV/a  
**JABATAN** : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

#### **B. FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;

- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranProgram	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	18%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.129.834.819	Dana DAU dan DBHCHT
	<b>T o t a l</b>	<b>5.129.834.819</b>	

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18%	13%	72%	berhasil

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.129.834.819	1.558.035.300	30,37 %	18%	13%	72%	35,63%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 5.129.834.819
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 1.558.035.300
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 30,37%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja sebesar 18% dengan relaisasi kinerja sbesar 13%, sehingga capaian kinerja tribulan II sebesar 72%

3. Analisa kinerja

Adapun formula perhitungan sesuai indikator kunci sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% \\
 & = \frac{13 \text{ Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{85 \text{ Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% \\
 & = 15 \%
 \end{aligned}$$

Adapun perda/perkada memuat sanksi yang telah ditegakan pada tabel di bawah ini

Tabel data penegakan perda/perkada memuat sanksi yang telah di tegakan

No	Jenis Penertiban	Nomor Perda dan Perkada
1	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2012 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3	Perda Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 12 Tahun 1981 T - Pajak Pemotongan Hewan
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 - Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi
6	Penertiban dan pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang
7	Restribusi Ijin mendirikan bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang
8	tambang ilegal	Perda no 18 Tahun 2006 - surat ijin pertambangan daerah
9	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang
10	Pajak mineral batuan dan logam	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile ) terpadu
13	Penanganan atas Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA  
Plt.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA BIDANG PENEGAKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**  
NIP. 19661111 198903 1 013





**LAPORAN KINERJA TRIWUAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **SUKARDI,S.AP**  
**NIP** : **19670921 199403 1 002**  
**PANGKAT** : **Penata Tingkat I**  
**GOLONGAN** : **III/d**  
**JABATAN** : **KEPALA SEKSI PENYULUHAN MASYARAKAT**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	2.488.140.366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>2.488.140.366</b>	

#### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	6 laporan	50%	

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	2.488.140.366	805.072.000	32,36 %	12 laporan	6 laporan	50%	17,64%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 2.488.140.366
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 805.072.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 32,36%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja adalah 12 laporan dengan realisasi sebesar 6 laporan sehingga capaian kinerja sebesar 50 %

3. Analisa kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha Yang dimaksud laporan disini adalah laporan bulan Januari – laporan bulan Juni. Dan capaian kinerja tribulan I1 sebesar 50% yaitu laporan Januari-Juni Tahun 2023. Adapun kegiatan sosialisasi selama bulan Januari sampai Juni pada tabel di bawah ini :

Tabel kegiatan sosialisasi

NO	KETERANGAN
1	sosialisasi kenakalan remaja di SMPN 4 LUMAJANG
2	sosialisasi perundang undangan rokok ilegal kepada lapisan masyarakat

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>
3	sosialisasi pencegahan kenakalan remaja bertempat di MTs Sunan Ampel Kandangtepus Kecamatan Senduro.
4	sosialisasi pencegahan kenakalan remaja bertempat di Mts Fajrul islam kecamatan Tempeh.
5	Sosialisasi terkait bahaya penyimpangan remaja do era milenial juga memberikan pembinaan kepada para pelajar agar supaya dapat menegerti dan membedakan baik dan buruknya perilaku menyimpang dari kenakalan remaja. Peserta Sosialisasi di ikuti oleh 68 siswa dan siswi. Peserta auntosias mengikuti kegiatan penyuluhan. di MTs. Fajrul Islam Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai Narasumber. Kegiatan di buka oleh kepala sekolah Mts Fajrul Islam Tempeh. Materi yang disampaikan yaitu
6	sosialisasi terkait aturan PKL berjualan di trotoar melalui siaran radio
7	sosialisasi perundang undangan rokok ilegal kepada lapisan masyarakat
8	Sosialisasi Pertambangan pasir
9	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan diadakannya jalan santai sebanyak 5 kali
10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada ASN

#### **D. TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja kepala seksi penyuluhan masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim Selalu siap menghadiri undangan terkait kegiatan sosialisasi ke lembaga pendidikan.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG PENEGAKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**

NIP. 19661111 198903 1 013

KEPALA PELAKSANA SEKSI  
PENYULUHAN MASYARAKAT



**SUKARDI, S.AP**

19670921 199403 1 002



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **AGUS HARYOTO, SH**  
**NIP** : **19700625 200604 1 005**  
**PANGKAT** : **Penata Tingkat I**  
**GOLONGAN** : **III/d**  
**JABATAN** : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
- d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	50.034.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>50.034.000</b>	

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	6 laporan	50 %	

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.034.000	14.840.000	29,66	12 laporan	6 laporan	50%	20,34%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 50.034.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 14.840.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 29,66%

2. Evaluasi capaian kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Juni. Dan capaian kinerja tribulan II sebesar 50% yaitu laporan Januari-Juni Tahun 2023

3. Analisa kinerja

Adapun kegiatan seksi pembinaan dan pengawasan tribulan II terdiri dari :

- a. Monitoring tanah streen di Desa Banyuputih Kidul
- b. Monitoring terkait pemotongan hewan ternak sapi di Kec. Yosowilangun
- c. kegiatan panen padi yang melewati perum graha budi mantoro/fasilita umum
- d. Mediasi terkait ternak bebek di Desa Kabuaran
- e. Pembinaan dan pengawasan terkait tambang pasir urug ilegal di desa kaliwungu
- f. Pembinaan dan pengawasan terkait keramaian di café broder kel. Tompokersan kec. Lumajang

- g. Pembinaan dan pengawasan terkait tambang pasir dusun curah jeruh desa kebonsari kec. Sumbersuko
- h. Pembinaan dan pengawasan terkait budidaya bebek di dusun glendang petung desa gondorso kec. Pasirian
- i. Pembinaan dan pengawasan terkait bau yang menyengat dari mesin produksi sablon jersey kel tompokersan
- j. Pembinaan dan pengawasan terkait papan reklame (neon box) king perfume's di kel. Tompokersan
- k. Pembinaan dan pengawasan permasalahan tanah kas desa di sumberanyar kec. Rowokangkung
- l. Pembinaan dan pengawasan mediasi permasalahan tanah PSU kavling graha budimantoro kel. Jogoyudan
- m. Pembinaan dan pengawasan terkait papan reklame yang melanggar dan memberi peringatan kepada pemilik reklame
- n. Pembinaan dan pengawasan terkait dampak peternak ayam potong di labruk lor sumbersuko
- o. Pembinaan dan pengawasan terkait Hotel cantik desa tukum terkait ijin hotel

**D. TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja kepala seksi penyuluhan masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim Selalu siap menghadiri undangan terkait kegiatan sosialisasi ke lembaga pendidikan.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**  
NIP. 19661111 198903 1 013



**AGUS HARYOTO, SH**  
197000625 200604 1 005



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn**  
**NIP** : **19840207 201001 2 033**  
**PANGKAT** : **Penata Tingkat I**  
**GOLONGAN** : **III/d**  
**JABATAN** : **POLISI PAMONG PRAJA MUDA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	2.591.660.453	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>2.591.660.453</b>	

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	6 laporan	50%	

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2.591.660.453	738.123.300	28,48 %	12 laporan	6 laporan	50%	21,52%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 2.591.660.453
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 738.123.300
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 28,48%

#### 2. Evaluasi capaian kinerja

Analisis realisasi kinerja sub koordinator Penyelidikan dan Penyidikan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Juni. Dan capaian kinerja tribulan II sebesar 50% yaitu laporan Januari-Juni Tahun 2023

#### 3.. Analisis realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja tribulan II sebesar 50 yaitu laporan Januari-Juni Tahun 2023. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan adalah penanganan PMKS (badut, gelandangan dan pengemis), penanganan bebrapa remaja sedang pesta minuman keras, penanganan penyidikan remaja tawuran. Adapun kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur selama triwulan II adalah :



- a. Melaksanakan penyidikan hasil penertiban PMKS (badut, pengemis dan gelandangan)
- b. Melaksanakan penyidikan terhadap hasil penertiban reklame
- c. Melaksanakan penyidikan terhadap hasil penertiban sekumpulan remaja yang mengganggu tertibum dengan pesta minum keras
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap penimbunan pasir diluar stockpile
- e. Penanganan Badut dan Gepeng di lampu merah simpang lima Gading Sari
- f. Operasi Terpadu Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal di Wilayah Kabupaten Lumajang

**D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI**

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan seksi penyidik Adalah berkoordinasi dengan pihak/dinas terkait yang berhubungan dengan kasus laporan yang sedang di sidik dan mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dan kepada Kepala BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
MUDA



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**  
NIP. 19661111 198903 1 013



**INDIRA MAYA NILAMSARI. SH, MKn**  
NIP. 19840207 201001 2 003



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAL II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MUCHAMAD CHILMI, SH  
**NIP** : 19761020 200801 1 007  
**PANGKAT** : PENATA MUDA  
**GOLONGAN** : III/a  
**JABATAN** : PENYULUH KEMASYARAKATAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah
- b. Melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan seksi penyuluhan

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Penyuluh Kemasyarakatan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan
		Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah	25 laporan
		Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan	75 dokumen

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisas	Capaian	
1	Meningkatnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan	15 kegiatan	50 %	
		Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan	15 kegiatan	50%	
		Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah	25 laporan	13 laporan	52%	

		Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan	75 dokumen	37 dokumen	50,6%	
--	--	---	------------	------------	-------	--

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi capaian kinerja

Penyuluh Kemsyarakatan mempunyai beberpa indiktor antara lain:

- Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah terget kinerja 30 kegiatan relisasi kinerja 15 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 50%
- Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah terget kinerja 30 kegiatan relisasi kinerja 15 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 50%
- Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah terget kinerja 25 dokumen relisasi kinerja 13 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 52%
- Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan terget kinerja 75 dokumen relisasi kinerja 37 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 50,6%

### . RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan penyuluh kemasyarakatan adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan salanjutnya.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyuluh kemasyarakatan dengan Kepala Seksi penyuluh Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA SEKSI  
PENYULUH MASYARAKAT



**SUKARDI, S.AP**  
19670921 199403 1 002

PENYULUH KEMASYARAKATAN



**MUCHAMAD CHILMI, SH**  
NIP. 19761020 200801 1 007



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN I TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **SLAMET IMAM SANTOSA**  
**NIP** : **19731215 200604 1 016**  
**PANGKAT** : **PENATA MUDA**  
**GOLONGAN** : **III/a**  
**JABATAN** : **PENGADMINISTRASI UMUM**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **B. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- b. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi umum dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima	45 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat	45 dokumen
		Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan	45 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisas	Capaian	
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima	45 dokumen	23 dokumen	51%	
		Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat	45 dokumen	23 dokumen	51%	
		Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan	45 kegiatan	23 dokumen	51%	

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja

Penyuluh Kemsyarakatan mempunyai beberpa indiktor antara lain:

- Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima target kinerja 45 dokumen, realisasi 23 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 51%
- Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat target kinerja 45 dokumen, realisasi 23 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 51%
- Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan target kinerja 45 dokumen, realisasi 23 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 51%

**. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI**

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan Pengadministrasi umum adalah mempertahankan dengan capaian kinerja yang telah diraih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan berikutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasian Umum dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

PENGADMINISTRASI UMUM



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**  
NIP. 19661111 198903 1 013



**SLAMET IMAM SANTOSA**  
NIP. 19731215 200604 1 016



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAL II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **EDY SUTRISNO**  
**NIP** : **19750104 200901 1 003**  
**PANGKAT** : **PENGATUR TINGKAT I**  
**GOLONGAN** : **II/d**  
**JABATAN** : **PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG -  
UNDANGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **C. TUGAS POKOK**

- d. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- e. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- f. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi data perundang-undangan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan	75 dokumen
		Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi	75 dokumen
		Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya	75 laporan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan	75 dokumen	38 dokumen	50,66%	
		Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi	75 dokumen	38 dokumen	50,66%	
		Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya	75 laporan	38 laporan	50,66%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 2. Evaluasi capaian kinerja

Pengadministrasi perundang-undangan mempunyai beberpa indiktor antara lain:

- Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan target kinerja 75 dokumen, realisasi 38 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50,66%
- Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi target kinerja 75 dokumen, realisasi 38 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50,66%
- Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya target kinerja 75 laporan, realisasi 38 laporan dengan capaian kinerja sebesar 50,66%

#### . RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan Pengadministrasi umum adalah mempertahankan dengan capaian kinerja yang telah diraih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan berikutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain



### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasian Umum dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

PENGADMINISTRASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



**DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM**  
NIP. 19661111 198903 1 013



**EDY SUTRISNO**  
Ni\NIP. 19750104 200901 1 003



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **S U N A R D I, SP.MP**  
**NIP** : **NIP. 19651201 198903 1 012**  
**PANGKAT** : **PEMBINA**  
**GOLONGAN** : **IV/a**  
**JABATAN** : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja/Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Tercapai

**Tabel Cost Per Outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.885.472.644	728.554.000	14,91%	100%	100%	100%	85%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 4.885.472.644
- b. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 300.138.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 61 %
- d. Presentase capaian kinerja sebesar 100 %

#### 2. Evaluasi capaian kinerja

capaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat target kinerja sebesar 100% dengan relisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%

#### 3. Analisa kinerja

Adapun indicator yang dipakai adalah Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dengan formulasi formulasi perhitungan di bawah ini:

Penanganan gangguan keteneteraman dan ketertiban umum

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{72 \text{ pengaduan yang diselesaikan}}{72 \text{ pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Tribulan I I pengaduan masuk sebanyak 55 pengaduan dan tertangani semua, sehingga capaian kinerja mencapai 100%

Adapun penanganan pengaduan tersebut terdiri dari:

- 41 penanganan pengaduan hewan liar
- 1 penanganan pengaduan terkait uasaha las yang menimbulkan suara bising sehingga menganggu trantibummas
- 7 penanganan pengaduan terkait keberadaan ODGJ dengan kondisi marah<sup>2</sup> di tengah masyarakat sehingga menganggu mayayarakat
- 4 penanganan pengaduan keberadaan PKL berjualan di trotoar sehingga menganggu hak pengguna jalan
- 1 penanganan pengaduan vasilitas jalan umum
- 2 pengaduan terkait tambang pasir
- 2 penanganan pengaduan pengaduan terkait balleho
- 1 penanganan pengaduan rumah potong hewan
- 5 penanganan pengaduan cincin yang tidak bisa dilepas

- 2 penanganan pengaduan terkait keberadaan pengemis yang berada di jalan
- 2 penanganan pengaduan terkait keberadaann café yang meresahkan masyarakat
- 1 'Pengaduan Terkait Bau Menyengat Dari Toko Pembuatan Jersey
- 1 Pengaduan Orang Tidak Sadarkan Diri di Depan Bakor
- 1 Konsleting Listrik (PLN)
- 1 Pengaduan Terkait Buang Sampah Di Sungai Bondoyudo

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Segera menuju lokasi pengaduan adanya hewan liar dan mengamankannya
2. Dilakukan pengecekan surat ijin usaha dan dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel las
3. Segera melakuka pengamanan terhadap ODGJ dan melakukan koordinasi dengan dinas sosial
4. Segera menertibkan PKL dan memberi pembinaan dan pemahaman terkait aturan berjualan di trotoar
5. Malakukan mediasi dengan pihak terlapor dan yang dilaporkan dan menyelesaikan permasalahan penggunaan fasilitas umum yaitu jalan dengan cara kekeluargaan
6. Dilakukan peringatan kepada para pemilik stockpile agar tidak melakukan kegiatan penimbunan pasir dan segera dipindahkan ke stockpile yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah (Stockpile Terpadu)
7. Dilkukan pendataan hasil reklame dan pelepasapasan balleho karena salah pemasangan
8. Dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan sehingga esuai aturan yang berlaku
9. Penanganan Badut dan Gepeng di Wilayah Kecamatan Lumajang;
10. Pembuatan Surat Pernyataan terhadap badut dan pengemis bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari pihak/ lembaga/ instansi yang berwenang apabila terjadi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dikemudian hari.

**E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim tribulan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

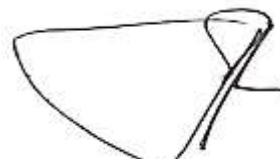
Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA  
Plt.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA BIDANG  
KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

.



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : ADIARTO HENDRO SETIAWAN, S.T  
**NIP** : NIP. 19841122 201001 1 023  
**PANGKAT** : PEMBINA TINGKAT I  
**GOLONGAN** : III/d  
**JABATAN** : KEPALA SEKSI KERJA SAMA



## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kerja Sama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	6 dokumen	50 %	Tercapai

**Tabel Cost Per Outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.057.500.000	539.700.000	51,04 %	12 Dok	6 Dok	50%	-1,04

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.057.500.000
- b. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 539.700.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 51,04 %

#### 2. Evaluasi capaian kinerja

Analisisa realisasi kinerja Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

Indikator program adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perkada serta Kejahatan lainnya. Yang dimaksud dokumen disini adalah dokumen pelaporan Januari – Juni (Triwulan II). Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 50 % yaitu dokumen laporan kinerja Januari-Juni Tahun 2023.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Jajaran disamping terdiri dari POLRI. Adapun kegiataanya adalah patroli di tempat rawan terjadinya gangguan keamanan (begal), patroli di tempat remang-remang/rumah kost dan operasi diwilayah dugaan terjadinya prostitusi

#### 3. Analisa kinerja

Adapun indikator yang dipakai adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Dokumen dimaksud adalah dokumen Januari sampai Juni 2023.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Jajaran samping terdiri dari TNI/POLRI. Adapun kegiataanya adalah :

1. Operasi tempat rawan asusila yaitu Operasi gabungan dengan UP3M di Kecamatan Summersuko
2. Operasi tempat rawan begal dan Pencurian yaitu Operasi gabungan dengan TNI/ POLRI di wilayah Kecamatan Pasirian

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala seksi kerjasama adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah menambah jumlah kegiatan kerjasama dengan jajaran samping sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terciptakan

**E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

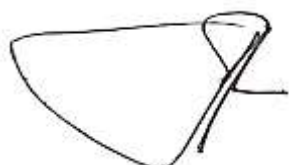
LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Kerja Sama kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak.

Demikian LKj Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI KERJA SAMA



**ADIARTO HENDRO SETIAWAN, ST**  
NIP. 19841122 201001 1 023

⋮



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023  
PEJABAT FUNGSIONAL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : EKO BUDI SANTOSO  
**NIP** : NIP. 19731104 199402 1 002  
**PANGKAT** : PENATA TINGKAT I  
**GOLONGAN** : III/d  
**JABATAN** : POLISI PAMONG PRAJA MUDA (BIDANG KETERTIBAN  
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT)

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Polisi Pamong Praja Keahlian Muda dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja/Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	50 Kasus
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	1700 Kasus

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	50 kasus	16 kasus	32%	

No	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	1700 kasus	800 kasus	47 %	

**Tabel Cost Per Outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	429.456.000	204.000.000	47,50%	50 kasus	16 kasus	32%	-15%
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	3.193.585.644	671.314.000	21,02 %	1700 kasus	800 kasus	47%	26%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### Sub Kegiatan 1:

##### 1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Muda (Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 429.456.000
- b. Realisasi pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 204.000.000

c. Persentase serapan anggaran adalah: 47,50 %

## 2. Analisa kinerja

**Indikator Sub Kegiatan 1** adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dengan target kinerja sebesar 50 Kasus, adapun realisasinya pada triwulan II tahun 2023 sebesar 16 kasus (32%). Kasus tersebut didapat dari kegiatan pengamanan pejabat dan tamu penting, patroli wilayah, yang dilakukan 2 kali sehari, Adapun rincian kasus tersebut tersebut terdiri dari

- 11 kasus keberadaan gelandangan dan pengemis ,
- 2 kasus keberadaan badut,
- 1 kasus kumpulan remaja sedang pesta miras dan membawa senjata tajam
- 1 kasus pasangan remaja yang melakukan kegiatan prostitusi
- 1 kasus remaja dari berbagai asal sekolah yang telah melakukan kegiatan tawuran di makan umum kelurahan jogoyudan;

### **Sub Kegiatan 2 :**

#### 1. Evaluasi anggaran

Evaluasi anggaran anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Muda (Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat) untuk sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 3.193.585.644
- b. Realisasi pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp 671.314.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 21,02%

#### 2. Analisa kinerja

**Indikator Sub Kegiatan** adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan target kinerja sebesar 1700 kasus dengan realisasi pada triwulan II tahun 2023 sebesar 800 kasus (50%). Adapun kasus yang dimaksud adalah kasus yang diperoleh berdasarkan beberapa penindakan antara lain:

1. kegiatan operasi banner sebanyak 780
2. Kegiatan operasi PKL sebanyak 20

### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja sub koordinator operasi dan pengendali adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah Membawa hasil patroli ke mako dan melimpahkan kasusnya ke bidang penegakan produk hukum



**E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Polisi Pamong Praja Ahli Muda Kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah kegiatan dibawah sub koordinator operasi dan pengendali dilakukan dua kali dalam sehari, sehingga berpotensi menciptakan ketenteraman dan ketertibn umum masyarakat

Demikian LKj Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

POLISI PAMONG PRAJA AHLI  
MUDA



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012



**EKO BUDI SANTOSO**  
NIP. 19731104 199402 1 002

.



**LAPORAN KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON IV  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : SUGIANTO, S.Pd  
**NIP** : NIP. 19650924 198703 1 010  
**PANGKAT** : PENATA TINGKAT I  
**GOLONGAN** : III/d  
**JABATAN** : KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	40 orang	100%	berhasil

**Tabel Cost Per Outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	204.931.000	127.154.000	62,05 %	40 orang	40 orang	100%	37,95 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pelatihan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 204.931.000
- b. Realisasi pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 127.154.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 62,05%

#### 2. Evaluasi capaian kinerja

Analisisa realisasi kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan target 40 orang, relisasi sebesar 40 orang sehingga capaian kinerja 100%

#### 3. Evaluasi capaian kinerja

Analisa capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 40 orang, realisasi 40 orang yang mengikuti peningkatan kapasitas yaitu beberapa pelatihann berupa pelatihan Kesamaptaan dalam rangka HUT Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Selain HUT Satpol PP terdapat kegiatan rutin yang dilakukan oleh seksi pelatihan dasar yaitu pembinaan terhadap kepada petugas upacara dari perwakilan setiap OPD secara bergiliran yang dilakukan setiap hari Senin di halaman Pemkab. Selain pembinaan kepada petugas upacara kegiatan lain seksi pelatihan dasar adalah monitoring terhadap semua personil terkait kedisiplinan.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kualitas kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar ada tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Tetap melakukan pembinaan petugas upacara
2. Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin

### E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Kepala Seksi Pelatihan Dasar Kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah kegiatan pembinaan kepada petugas upacara OPD dan monitoring persnomil dilakukan secara rutin dan disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR



**SUGIANTO, S.Pd**  
NIP. 19659241987031010

.



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : RIFAL CHOIRUDIN MALIK  
**NIP** : 19800603 200901 1 006  
**PANGKAT** : Pengatur Tingkat I  
**GOLONGAN** : III/d  
**JABATAN** : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	21 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	6 kegiatan	46%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	



No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	27 kegiatan	50,94%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	4 kegiatan	50%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 21 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 46%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 27 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,94%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen dan capaian kerja 50%.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

**E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012



**RIFAL CHOIRUDIN MALIK**  
NIP.19800603 200901 1 006



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : SOLICHIN  
**NIP** : 19720812 200701 1 026  
**PANGKAT** : Pengatur Muda Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/b  
**JABATAN** : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	21 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	6 kegiatan	46%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum,	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		dan penegakan produk hukum daerah				
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	27 kegiatan	50,94%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	4 kegiatan	50%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 21 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 46%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 27 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,94%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen dan capaian kerja 50%.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

**E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

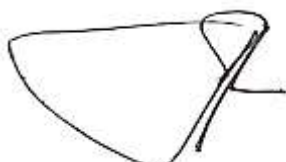
### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**

NIP. 19651201 198903 1 012

KOMANDAN PETUGAS  
KEAMANAN



**SOLICHIN**

NIP. 19720812 200701 1 026





**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MASHUDI  
**NIP** : 19720603 200901 1 002  
**PANGKAT** : Pengatur Muda Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/d  
**JABATAN** : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	21 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	6 kegiatan	46%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
	ketentraman dan ketertiban umum daerah	ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat				
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan	42 kegiatan	50,60%	
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	27 kegiatan	50,94%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	4 kegiatan	50%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 21 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 46%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 42 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,60%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 27 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 50,94%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen dan capaian kerja 50%.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

#### **E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KOMANDAN PETUGAS  
KEAMANAN



**MASHUDI**  
19720603 200901 1 002



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIWULAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : NURI CATUR PRIBAWANTO  
**NIP** : 19750114 200901 1 004  
**PANGKAT** : Pengatur Muda Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/d  
**JABATAN** : PETUGAS KEAMANAN (PETUGAS TINDAK INTERNAL)

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kedisiplinan anggota Satuan polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	5 kegiatan
		Jumlah kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin	5 kegiatan
		Jumlah kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP	4 kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	4 kegiatan

### B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kedisiplinan anggota Satuan polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	5 kegiatan	3 kegiatan	60%	
		Jumlah kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin	5 kegiatan	3 kegiatan	60%	
		Jumlah kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan	4 kegiatan	2 kegiatan	50%	

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP				
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	4 kegiatan	2 kegiatan	50%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP dg target kinerja sebesar 5 kegiatan dengan realisasi sebesar 3 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 60%
2. Kegiatan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin dengan target kinerja 5 kegiatan dengan realiasasi 3 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 60%
3. Kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP dengan target kinerja 4 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
4. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP dengan target kinerja 4 kegiatan dengan realisasi sebesar 2 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%.

### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

### E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain



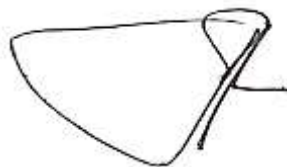
### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

PETUGAS KEAMANAN (PTI)



**NURI CATUR PRIBAWANTO**  
19750114 200901 1 004



**LAPORAN KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos.MM  
**NIP** : 19721102 199403 1 006  
**PANGKAT** : PEMBINA  
**GOLONGAN** : IV/a  
**JABATAN** : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

#### **B. FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang sebagai berikut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara epala Bidang Pelindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.1**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100 %
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2,4%
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Rp.</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	628.405.500	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	694.330.995	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	25.842.357	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	30.230.900	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>1.378.809.752</b>	

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel: 2.2  
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100 %	50%	50%	
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	
3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2,4%	0%	0%	
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%	

Tabel cost per outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	628.405.500	300.138.000	47,76%	100 %	50%	50%	2,24%
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	694.330.995	307.573.000	44,30 %	100 %	100 %	100 %	55,7
3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	25.842.357	0	0	2,4%	0%	0%	0
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	30.230.900	0	0	100 %	100 %	100 %	100

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi anggaran

##### a. Kegiatan pertama :

Kegiatan pertama adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 628.405.500
2. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 300.138.000
3. Persentase serapan anggaran adalah: 47,76%
4. Realisasi Kinerja pada triwulan II sebesar 50%

##### b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 694.330.995
2. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 307.573.000
3. Persentase serapan anggaran adalah: 44,30 %
4. Realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 100%

##### c. Kegiatan ketiga :

Kegiatan ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 25.842.357
2. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 0
3. Persentase serapan anggaran adalah: 0 %
4. Realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 0%

##### d. Kegiatan ke empat :

Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 30.230.900
2. Realisasi anggaran pada Triwulan II sebesar Rp. 0

3. Persentase serapan anggaran adalah: 0 %
4. Realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 100%

## 2. Analisa capaian kinerja

### a. Kegiatan pertama :

Kegiatan adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% realisasi kinerja 50% sehingga capaian kinerja sebesar 50%

### b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan target kinerja 100% realisasi kinerja 100% sehingga capaian kinerja 100%

### c. Kegiatan ketiga :

Kegiatan ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran dengan target kinerja 2,4% realisasi kinerja sebesar 0% sehingga capaian kinerja sebesar 0%

### d. Kegiatan ke empat :

Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target kinerja 100% realisasi kinerja sebesar 100%

## 3. Analisa Kinerja

### a. Kegiatan pertama :

Kegiatan pertama adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan formulasi perhitungan Jumlah desa /Kelurahan Yang Dipatrol di Pada Tahun N Dibagi Jumlah Desa/Kelurahan Se Kabupaten Lumajang dikali 100%

$$= \frac{99 \text{ desa}}{198 \text{ desa}} \times 100\% \\ = 50 \%$$

### b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan formulasi perhitungan Jumlah penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N dibagi Jumlah seluruh laporan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N dikali 100%

$$= \frac{\dots \text{penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran}}{\dots \text{seluruh laporan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Penanganan tersebut terdiri dari 11 penanganan kebakaran dan 23 penanganan non kebakaran

### c. Kegiatan ketiga :

Kegiatan ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran dengan formulasi perhitungan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lumajang Yang Sudah Dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran

pada Tahun N Dibagi Jumlah Seluruh Desa/ Kelurahan di Kabupaten Lumajang Dikali 100%

Belum ada pembentukan relawan sampai triwulan I, sehingga capaian kinerja Triwulan II masih 0%

- d. Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan formulasi perhitungan Jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan pada tahun N dibagi Jumlah seluruh kejadian terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaporkan pada tahun N dikali 100%

$$= \frac{23 \text{ Jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan}}{23 \text{ Seluruh jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan}} \times 100\% = 100\%$$

Penanganan di atas adalah penanganan hewan liar seperti biawak, ular, sarng lebah dan kucing yang terjebak



**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Adapun tindak lanjut seksi peanganan kebakaran adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan selalu siap siaga terhadap kejadian yang membahayakn manusia

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG



**SUNARDI, MP**  
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA BIDANG PELINDUNGAN  
MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006



**LAPORAN KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **ADNIN, S.Pd**  
**NIP** : **19670105 199403 1 010**  
**PANGKAT** : **PEMBINA TINGKAT I**  
**GOLONGAN** : **IV/b**  
**JABATAN** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	518.225.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>Total</b>		<b>518.225.000</b>	

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	518.225.000	293.288.000	39 %	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	11%

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh sub koordinator Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 518.225.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 293.288.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 39 %

2. Evaluasi kinerja

Target kinerja adalah 12 dokumen dengan relisasi 6 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 50%

3. Analisis kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Satuan Lintas Masyarakat **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dokumen tersebut adalah dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Juni 2023. Adapun capaian triwulan II sebesar 50% yaitu dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Juni 2023. untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.

Kegiatan seksi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota merupakan

rutin yang dilaksanakan setiap hari 2 kali berupa patroli penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun wilayah patroli selama triwulan II di 53 desa

**D. TINDAK LANJUT.**

Adapun tindak lanjut seksi satlinmas dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Juni tahun 2023 adalah memertahankan capaian kinerja yang telah diraih, melakukan pemerataan wilayah patroli.

**RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Koordinator Pelindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PELINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
MUDA



**ADNIN, S.Pd**  
NIP. 19670105 199403 1 010





**LAPORAN KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2023  
PEJABAT ESELON III  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **AGUS LESTARIYONO, A.Md.Kep.**  
**NIP** : **19670803 198803 1 008**  
**PANGKAT** : **Penata Tingkat I**  
**GOLONGAN** : **III/d**  
**JABATAN** : **Kepala Seksi Bina Potensi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.180.500	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	<b>Total</b>	<b>110.180.500</b>	-

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan II tahun 2023:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	

**Tabel cost per outcome**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.180.500	6.850.000	6,22%	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	43,78 %

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 110.180.500
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 6.850.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 6,22%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 12 dokumen dengan realisasi 6 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 50 %

3. Analisa kinerja

Analisis r kinerja Kepala Seksi Bina Potensi sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.laporan yang dimaksud adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Juni 2023. Adapun capaian tribulan II adalah laporan bulan Januauri sampai dengan laporan bulan Juni 2023. Sehingga capaian kinerja sebesar 50%.

**D. TINDAK LANJUT.**

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA  
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

KEPALA SEKSI BINA POTENSI  
MASYARAKAT



**AGUS LESTARIYONO, A.Md.Kep.**  
19670803 198803 1 008



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MUHAMMAD ZAENURI  
**NIP** : 19750919 200901 1 003  
**PANGKAT** : Penata Tk. I  
**GOLONGAN** : II/d  
**JABATAN** : Plt. Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
5. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bahaya kebakaran
6. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	40 orang
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	530.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	86.826.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	104.191.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.842.357	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	30.230.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	<b>JUMLAH</b>	<b>750.404.252</b>	

## B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	6 lapoan	50%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	1 unit	20 %	
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	40 orang	40 orang	100%	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa	0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	6 laporan	50%	

Tabel cost per outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Eisiensi
			TargetRp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4	(7)	(8)	(10)= 8/7	11=6-10
1	Meningkatnya Pemadam dan Pengendalian Kebakara	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran Dalam	530.313.000	218.957.000	43,50 %	12 laporan	6 lapo 12ran	50%	6,5%

n dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	86.826.025	5.184.000	5,97	5 Unit	1 unit	20 %	14,03%	
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	104.191.970	83.432.000	80,08%	40 orang	40 orang	1000 %	19,92%	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	25.842.357	0	0	5 Desa	0	0	0%	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	30.230.900	0	0	12 Laporan	6 laporan	50%	50%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

#### A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 476.020.000
  - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 218.957.000
  - c. Persentase serapan anggaran adalah: 43,50%
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Adalah sebagai berikut:
  - a. Indikator sub kegiatan 1 adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Laporan disini adalah laporan bulan Januari

sampai dengan laporan bulan Juni 2023. Adapun capaian tribulan II adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan Juni 2023. Sehingga capaian kinerja sebesar .....%.

Adapun formula perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{28 \text{ laporan}}{28 \text{ laporan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

## **B. Sub Kegiatan 2**

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 76.488.400
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp 5.184.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 5,97%
- d. Capaian kinerja 20%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait. Adapun targetnya adalah 4 unit yang terdiri dari :
  - Paket Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
  - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk pemadaman
  - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk petugas pemadaman
  - Paket Modal Alat Pemadam Kebakaran

Capaian kinerja tribulan II sebesar 20 %

Adapun formula perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ unit}}{5 \text{ unit}} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

**D. TINDAK LANJUT.**

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public ( Masyarakat ) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

Plt. KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN  
BENCANA KEBAKARAN

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

**MUHAMMAD ZAENURI**  
NIP. 19750919 200901 1 003



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : AGOES WIDJAJA  
**NIP** : 19680920 200801 1 009  
**PANGKAT** : Pengatur Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/d  
**JABATAN** : Pranata Perlindungan Masyarakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketertarikan, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,71%	
		Jumlah kegiatan penanganan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	

		ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades				
--	--	---	--	--	--	--

**C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%

**F. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

**G. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:**

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**AGOES WIDJAJA**  
NIP. 19680920 200801 1 009



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **DJOKO AGUS FITRIANTO**  
**NIP** : **19800815 200801 1 016**  
**PANGKAT** : **Pengatur Muda**  
**GOLONGAN** : **II/a**  
**JABATAN** : **Pranata Perlindungan Masyarakat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,71%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%

### H. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### I. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**DJOKO AGUS FITRIANTO**  
19800815 200801 1 016





**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAL II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MUHAMAD ADANG SUHARIYANTO  
**NIP** : 19680312 200801 1 019  
**PANGKAT** : Pengatur Muda Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/b  
**JABATAN** : Pranata Perlindungan Masyarakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,71%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%

### J. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### K. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MUHAMAD ADANG SUHARIYANTO**  
19680312 200801 1 019



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : **TOTOK SUGENG PURWANTO**  
**NIP** : **19760622 200901 1 005**  
**PANGKAT** : **Pengatur Tingkat I**  
**GOLONGAN** : **II/d**  
**JABATAN** : **Pranata Perlindungan Masyarakat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,71%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	



### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%

### L. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### M.RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

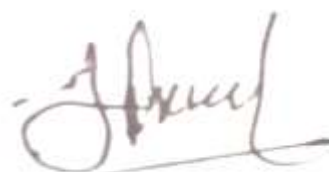
Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**TOTOK SUGENG PURWANTO**  
19760622 200901 1 005



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAL II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : SYAIFUL HADI  
**NIP** : 19800522 200801 1 007  
**PANGKAT** : Pengatur Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/d  
**JABATAN** : Pranata Perlindungan Masyarakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	15 kegiatan	51,71%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	15 kegiatan	51,72%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 15 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,72%

### N. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### O. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**SYAIFUL HADI**  
19800522 200801 1 007



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : SUPRIYO  
**NIP** : 19661111 200701 1 013  
**PANGKAT** : Pengatur Muda Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/b  
**JABATAN** : Pranata Pemadam Kebakaran



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	12 kegiatan	52,17 %	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 12 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 52,17%

### P. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### Q. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 30 Juni 2023  
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

**SUPRIYO**  
**NIP. 19661112007011013**



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : NGATEMAN  
**NIP** : 197406012009011005  
**PANGKAT** : Juru Tingkat I  
**GOLONGAN** : I/d  
**JABATAN** : Pranata Pemadam Kebakaran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	12 kegiatan	52,17 %	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 12 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 52,17%

### R. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### S. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisai diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain



### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

**NGATEMAN**  
NIP. 197406012009011005



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : PURYADI  
**NIP** : 196812292007011015  
**PANGKAT** : Pengatur Tingkat I  
**GOLONGAN** : II/b  
**JABATAN** : Pranata Pemadam Kebakaran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	12 kegiatan	52,17 %	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 12 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 52,17%

### T. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### U. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 30 juni 2023  
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

**PURYADI**  
NIP. 196812292007011015



**LAPORAN KINERJA STAF  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

**NAMA** : MOHAMAD NUR HASAN  
**NIP** : 196905152007011038  
**PANGKAT** : Juru Tingkat I  
**GOLONGAN** : I/d  
**JABATAN** : Pranata Pemadam Kebakaran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

#### **A. TUGAS POKOK**

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades



**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	17 kegiatan	51,51%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	36 kegiatan	50%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	12 kegiatan	52,17 %	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 51,51%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 36 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 50%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 12 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 52,17%

### V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

### W.RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

### **BAB III PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni

2023

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

**MOHAMAD NUR HASAN**  
NIP. 196905152007011038